

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Informasi kesehatan sangat diperlukan keberadaannya untuk terselenggaranya upaya kesehatan yang efektif dan efisien. Berdasarkan UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan, dijelaskan mengenai tanggung jawab pemerintah dalam ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan setinggi-tingginya.

Informasi kesehatan ini dapat diperoleh melalui Sistem Informasi Kesehatan atau SIK⁽¹⁾.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional Sistem informasi kesehatan menjadi lemah setelah menerapkan kebijakan desentralisasi. Untuk perencanaan data dan informasi kesehatan belum tersedia tepat waktu. Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) yang berbasis fasilitas sudah mencapai tingkat kabupaten/kota namun belum dimanfaatkan secara optimal.⁽²⁾ Sistem informasi kesehatan daerah (SIKDA) seharusnya bertujuan untuk mendukung Sistem informasi kesehatan nasional (SIKNAS), namun dengan terjadinya desentralisasi sektor kesehatan ternyata mempunyai dampak negatif. Terjadi kemunduran dalam pelaksanaan sistem informasi kesehatan secara nasional, seperti menurunnya kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaian data SP2TP/SIMPUS, SP2RS dan Profil Kesehatan.⁽⁷⁾

Salah satu kemajuan di bidang kesehatan yang saat ini sudah berkembang di berbagai negara adalah mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yaitu e-kesehatan (*e-Health*). WHO mendefinisikan E-Kesehatan adalah penggunaan TIK untuk kesehatan yang berhubungan dengan upaya meningkatkan

arus informasi , melalui sarana elektronik , untuk mendukung pelayanan kesehatan dan pengelolaan sistem kesehatan .⁽²⁾

Menurut Permenkes Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan menjelaskan bahwa sistem informasi kesehatan wajib dikelola pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk pengelolaan satu sistem informasi kesehatan skala Kabupaten/Kota.⁽³⁾

Sedangkan menurut Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 pasal 43 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat bahwa setiap Puskesmas wajib melakukan kegiatan sistem informasi puskesmas dan merupakan salah satu penilaian akreditasi Puskesmas. Sistem informasi puskesmas merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan kabupaten/kota dan wajib menyampaikan laporan kegiatan puskesmas secara berkala kepada Dinas Kesehatan kabupaten/kota⁽⁴⁾.

Departemen Kesehatan RI melalui Pusat Data Kesehatan (PUSDAKES) memanfaatkan teknologi informasi dengan sistem *Electronic Data Processing* (EDP). Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dibuatlah komitmen bersama antar pemimpin birokrasi bidang kesehatan untuk mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, baik di kabupaten/kota, provinsi dan pusat, namun karena berbagai kendala dan hambatan termasuk kurangnya dana dan tidak adanya payung hukum (PP) pemanfaatan teknologi informasi kurang optimal dan belum berdayaguna.⁽⁶⁾

Hasil evaluasi pelaksanaan Peta Jalan Sistem Informasi Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2011-2014 menunjukkan bahwa hanya sekitar 57% kegiatan sistem informasi kesehatan yang terlaksana. Berbagai permasalahan dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan sistem informasi kesehatan pada kurun waktu itu.⁽⁶⁾ SIK di Indonesia belum terintegrasi satu dengan lainnya . Informasi kesehatan

masih terpecah-pecah dan dalam mendukung kebutuhan dan penetapan kebijakan masih belum mampu. Untuk tindak lanjut permasalahan tersebut maka dalam hal ini wajib bagi pemerintah mengembangkan sistem informasi kesehatan yang mampu mengintegrasikan dan memfasilitasi proses pengumpulan dan pengolahan data, serta komunikasi data antar pelaksana pelayanan kesehatan mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan sampai dengan tingkat pusat, sehingga dapat meningkatkan kualitas informasi yang diperoleh. Pada saat bersamaan juga memperbaiki proses pengolahan informasi yang terjadi di daerah, yang pada akhirnya dapat mendukung pemerintah dalam penguatan sistem kesehatan di Indonesia⁽⁵⁾.

Melihat berbagai kondisi di atas maka dibutuhkan suatu aplikasi sistem informasi kesehatan yang berstandar nasional dengan format input maupun output data yang diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan dan tingkat pelayanan kesehatan kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Untuk itu pada awal tahun 2012, kementerian Kesehatan melalui Pusat Data dan Informasi meluncurkan aplikasi SIKDA Generik⁽⁷⁾.

Aplikasi SIKDA Generik merupakan aplikasi sistem informasi kesehatan daerah yang sudah berlaku secara nasional yang secara online menghubungkan dan mengintegrasikan seluruh puskesmas, rumah sakit, sarana kesehatan lainnya. SIKDA Generik merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan tidak berbayar. Aplikasi SIKDA Generik dibuat dan dirancang untuk memudahkan petugas puskesmas saat melakukan pencatatan dan pelaporan⁽⁷⁾.

Selain SIKDA Generik dari Kementerian Kesehatan terdapat aplikasi Puskesmas Elektronik yang lain yaitu e-Puskesmas. Dinas Kesehatan Kota Padang sendiri tidak memakai SIKDA Generik tetapi platform e-Puskesmas yang setiap

bulannya berbayar. e-Puskesmas merupakan aplikasi Puskesmas Elektronik yang bekerjasama dengan PT Telkom Indonesia. E-Puskesmas dirancang untuk proses digitalisasi dan pelayanan masyarakat. E-Puskesmas dapat mempermudah pelaporan data baik ke Dinas Kesehatan Kota hingga Dinas Kesehatan Provinsi. Dinas Kesehatan Kota Padang sendiri memilih e-Puskesmas dikarenakan kemudahan yang di dapat saat terjadi kesalahan sistem atau jaringan, vendor e-Puskesmas dalam hal ini PT.Telkom Indonesia dapat langsung mengatasi masalah yang terjadi. Berbeda dengan SIKDA Generik yang sudah terintegrasi di seluruh Indonesia, jika terjadi kesalahan sistem dan jaringan, harus menghubungi pihak pusat dahulu dan membutuhkan proses yang lama⁽⁸⁾.

Puskesmas di Kota Padang berjumlah sebanyak 23 Puskesmas dengan rincian 22 Puskesmas lama dan 1 Puskesmas yang baru diresmikan tahun 2017 lalu. Untuk implementasi E-Puskesmas sendiri semua Puskesmas di Kota Padang sudah melakukan pendampingan dari tahun 2016 dan menerapkan E-Puskesmas sejak Januari 2017 kecuali puskesmas Dadok Tunggul Hitam yang belum menerapkan E-Puskesmas. Pada tahun 2018 seluruh Puskesmas di Kota Padang sudah terakreditasi dan salah satu syarat akreditasi Puskesmas adalah tersedianya sistem informasi.

Berdasarkan survey awal dan wawancara yang telah dilakukan dengan sub bagian program di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Padang dan beberapa staf puskesmas, didapatkan bahwa pada masing-masing program sudah ada sistem online, tetapi belum semuanya terintegrasi dikarenakan belum berjalannya sistem pencatatan dan pelaporan satu pintu. Untuk di Puskesmas, masih ada beberapa kendala seperti jaringan, data yang belum *real time* dan *ontime*, masih ada beberapa fitur yang kurang dan belum optimalnya pemanfaatan E-Puskesmas ini oleh staf puskesmas.

Mengingat penerapan sistem informasi kesehatan daerah di Kota Padang sudah berjalan sejak Januari 2017, maka diperlukan evaluasi.

Salah satu model yang dapat digunakan dalam melakukan evaluasi sistem informasi adalah model evaluasi HOT fit. Ada tiga komponen yang sangat penting dalam sistem informasi yaitu *Human* (Manusia), *Organization* (Organisasi) dan *Technology* (Teknologi). Komponen Human (Manusia) menilai sistem informasi dari segi penggunaan sistem dan kepuasan pengguna. Komponen *Organization* (Organisasi) menilai sistem informasi dari segi struktur organisasi dan lingkungan organisasi dan komponen teknologi menilai sistem informasi dari kualitas sistem, kualitas informasi dan kualitas layanan.

Penelitian yang telah dilakukan Endah Lestari dengan judul *Evaluasi Sistem Informasi Kesehatan di Provinsi Jawa Tengah dalam Rangka Penguatan Sistem Informasi Kesehatan Nasional* tahun 2016 lalu dalam Implementasi PP No 46 Tahun 2014 tentang SIK di Provinsi Jawa Tengah belum optimal, dapat dilihat dari kondisi SDM dan anggaran SIK yang belum memadai di tingkat kabupaten/kota. Sedangkan penelitian yang telah dilakukan Khairina Iswati dengan judul *Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Generik di UPT. Puskesmas Gambut Kabupaten Banjar* didapatkan bahwa terdapat kompleksitas sehingga merepotkan pengguna di puskesmas karena harus mengisi beberapa tabel, selain itu banyaknya menu membuat pengguna mengalami kesulitan^(9,10).

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai Evaluasi Pelaksanaan Sistem Informasi Kesehatan Daerah di Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2018 di 22 Puskesmas di Kota Padang.

Diharapkan dengan penelitian ini dapat berkontribusi dalam perbaikan sistem informasi kesehatan dan masukan baik bagi Puskesmas maupun Dinas Kesehatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diketahui rumusan masalah penelitian adalah “ Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Sistem Informasi Kesehatan Daerah di Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2018 ?”

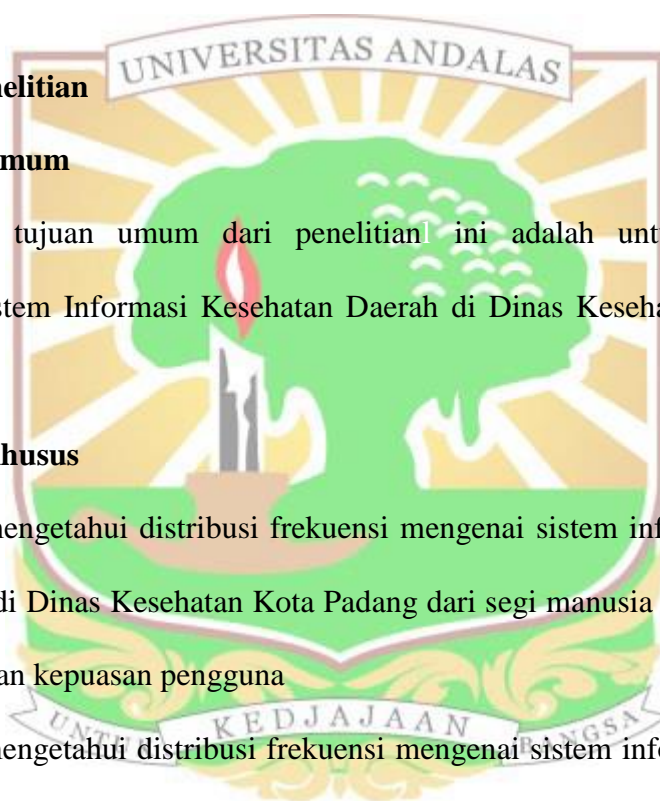
1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Pelaksanaan Sistem Informasi Kesehatan Daerah di Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2018.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui distribusi frekuensi mengenai sistem informasi kesehatan daerah di Dinas Kesehatan Kota Padang dari segi manusia yaitu penggunaan sistem dan kepuasan pengguna
2. Untuk mengetahui distribusi frekuensi mengenai sistem informasi kesehatan daerah di Dinas Kesehatan Kota Padang dari segi organisasi yaitu struktur organisasi dan lingkungan organisasi.
3. Untuk mengetahui distribusi frekuensi mengenai sistem informasi kesehatan daerah di Dinas Kesehatan Kota Padang dari segi teknologi yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan
4. Untuk mengetahui distribusi frekuensi mengenai sistem informasi kesehatan daerah di Dinas Kesehatan Kota Padang dari manfaat bersih



5. Untuk mengetahui informasi mendalam mengenai sistem informasi kesehatan daerah di Dinas Kesehatan Kota Padang dari segi manusia yaitu penggunaan sistem dan kepuasan pengguna.
6. Untuk mengetahui informasi mendalam mengenai sistem informasi kesehatan daerah di Dinas Kesehatan Kota Padang dari segi organisasi yaitu struktur organisasi dan lingkungan organisasi.
7. Untuk mengetahui informasi mendalam mengenai sistem informasi kesehatan daerah di Dinas Kesehatan Kota Padang dari segi teknologi yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan
8. Untuk mengetahui informasi mendalam mengenai sistem informasi kesehatan daerah di Dinas Kesehatan Kota Padang dari segi manfaat bersih

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Bagi penulis penelitian ini sebagai sarana dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang di dapat selama bangku perkuliahan, meningkatkan kemampuan dalam analisis masalah serta menambah pengalaman dan pengetahuan di lapangan.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat sebagai bahan bacaan dan masukan mengenai Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas di Kota Padang.

3. Bagi Puskesmas diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengembangan dan peningkatan kualitas sistem informasi kedepannya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup penelitian ini dibatasi hanya untuk mengevaluasi mengenai pelaksanaan sistem informasi kesehatan daerah di Dinas Kesehatan Kota Padang dengan menggunakan jenis penelitian mix method dengan menggunakan model evaluasi Hot-fit.

